

Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Desa dalam Mengatasi Krisis Sampah: Studi Kasus Desa Senuro Barat

Muhammad Hidayatullah ¹, Komaruddin ², Rina Pebriana ³

^{1,2,3} Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, Rw 05, Pahlawan, Kec.Kemuning, Kota Palembang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel

Dikirimkan:

8 April 2026

Direvisi:

11 April 2026

Diterima:

11 April 2026

Diterbitkan:

30 Maret 2026

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat dalam mengatasi krisis sampah serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan komunikasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah (Press Agency/Publicity) yang berfokus pada penyampaian informasi melalui rapat desa dan media publikasi. Strategi ini efektif dalam penyebaran informasi, namun belum mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat secara optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan umpan balik, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya penggunaan media komunikasi interaktif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian komunikasi publik di tingkat pemerintahan desa dalam konteks krisis lingkungan. Penelitian ini memberikan rekomendasi pengembangan strategi komunikasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan berbasis media interaktif guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kata Kunci

komunikasi humas,
pengelolaan sampah,
komunikasi publik,
partisipasi masyarakat,
krisis lingkungan

Abstract - This study aims to analyze the public relations communication strategy of the Senuro Barat Village Government in addressing the waste crisis and to identify the barriers in implementing public communication. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that the communication strategy is predominantly characterized by a one-way communication model (Press Agency/Publicity), focusing on information dissemination through village meetings and public media such as billboards and notice boards. While this approach is effective in delivering information, it has not been able to significantly foster active community participation. The main challenges include limited feedback mechanisms, low public awareness, and the lack of interactive communication media. Theoretically, this study contributes to the development of public communication and public relations literature, at the village government level in environmental crisis contexts. Practically, it offers recommendations for developing more dialogic and participatory communication strategies by utilizing interactive media to enhance community engagement in sustainable waste management.

Corresponding Author:

Muhammad Hidayatullah, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, Indonesia, 30126, Email: muhammadhdytlah20@gmail.com



PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang kompleks dan multidimensional, terutama pada tingkat pemerintahan desa yang memiliki keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta kapasitas komunikasi public (Aulia et al., 2024). Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta partisipasi publik (Shahreza et al., 2020). Dalam perspektif komunikasi publik, pemerintah memiliki peran strategis sebagai komunikator yang tidak hanya menyampaikan informasi kebijakan, tetapi juga membangun hubungan dengan masyarakat. Sedangkan pada kajian public relations modern dijelaskan bahwa humas memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara kepentingan organisasi dan publik, terutama melalui penyediaan informasi yang akurat, terbuka, dan berorientasi pada hubungan jangka panjang (Grunig, 2018). Komunikasi yang efektif seharusnya tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mampu menciptakan dialog dan partisipasi aktif masyarakat (Kosasi et al., 2025). Komunikasi humas (Hubungan Masyarakat) merupakan fungsi manajerial yang berperan dalam membangun serta memelihara hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya melalui proses komunikasi yang terencana dan berkesinambungan. Permasalahan komunikasi kebijakan seringkali semakin kompleks pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi Public Relations yang dikemukakan oleh Grunig dan Hunt, yang membagi model komunikasi ke dalam empat kategori, yaitu Press Agency/Publicity, Public Information, Two-Way Asymmetrical, dan Two-Way Symmetrical (Grunig & Hunt, 1984). Model Two-Way Symmetrical dipandang sebagai pendekatan ideal karena menekankan keseimbangan komunikasi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Tabel 1. Mode Gruning dan Hunt

Model	Jenis Komunikasi	Tujuan	Prioritas	Asumsi
<i>Press Agency/Publicity</i>	Satu Arah	Menciptakan perhatian dan publisitas	Daya tarik pesan, membangun citra	Dapat dipengaruhi melalui pesan intens; keberhasilan berdasarkan perhatian dan eksposur
<i>Public Information</i>	Satu Arah	Penyampaian informasi yang akurat	Akurasi, objektivitas, informatif	Rasional, mampu menilai kritis; transparansi membangun.
<i>Two-Way Asymmetrical</i>	Dua Arah (tidak seimbang)	Persuasif, mendukung kepentingan organisasi	Respons publik untuk strategi persuasif	Sikap dan perilaku dapat diarahkan berdasarkan pemahaman audiens; tanpa perubahan kebijakan substansial
<i>Two-Way Symmetrical</i>	Dua Arah (seimbang)	Dialog untuk kesepahaman bersama	Keterbukaan, kejujuran, penyesuaian kepentingan	Hubungan harmonis melalui interaksi setara; ideal untuk hubungan jangka panjang

Sumber: Grunig & Hunt (1984)

Pengelolaan sampah di wilayah pedesaan memiliki karakteristik tersendiri, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya alokasi anggaran, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, dinamika kepemimpinan di tingkat desa, khususnya pergantian kepala desa, seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan pembangunan yang tidak selalu disertai dengan proses komunikasi yang memadai kepada masyarakat. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi pemerintah dalam pengelolaan sampah masih cenderung didominasi oleh pendekatan satu arah. Penelitian oleh Kurniawan (2024) menemukan bahwa sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa masih dilakukan melalui media konvensional dan komunikasi satu arah. Hal serupa juga ditemukan oleh Silaban dan Viser (2023) yang menekankan bahwa komunikasi pemerintah lebih berfokus pada penyampaian informasi teknis dan penyuluhan, tanpa melibatkan interaksi yang intens dengan masyarakat. Di sisi lain, penelitian yang mengedepankan pendekatan komunikasi partisipatif menunjukkan hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Mustikawati et al. (2023) menunjukkan bahwa strategi komunikasi berbasis komunitas seperti pendekatan door-to-door dan pemanfaatan media digital mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, Cerya dan Evanita (2021) menegaskan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam membentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian Yunandar et al. (2024) juga menyoroti pentingnya integrasi

media digital dalam komunikasi publik untuk meningkatkan efektivitas kampanye lingkungan. Peneliti lainnya seperti (Khasanah & Wijayanti, 2025), lebih memfokuskan pada penerapan Knowledge, Attitude, Practice (KAP) untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada konteks perkotaan, komunikasi berbasis komunitas, atau aspek teknis dan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian seperti Muttahhara dan Haq (2023) lebih menitikberatkan pada evaluasi program pengelolaan sampah, sementara Zaini dan Muksin (2024) mengkaji peran humas pada level pemerintah daerah. Dengan demikian, kajian yang secara spesifik mengkaji strategi komunikasi Humas pemerintah desa dalam konteks krisis pelayanan publik masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu juga cenderung belum mengaitkan secara mendalam antara praktik komunikasi dengan kerangka teori komunikasi Public Relations secara komprehensif. Padahal, penggunaan kerangka teoritis yang jelas sangat penting untuk menganalisis pola komunikasi yang terjadi, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan strategi komunikasi yang tepat dan adaptif.

Fenomena tersebut dapat ditemukan di Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan observasi awal, desa ini mengalami krisis pengelolaan sampah akibat terhentinya layanan truk pengangkutan sampah pasca pergantian kepala desa. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah serta munculnya perilaku masyarakat yang membuang sampah secara tidak terkontrol. Permasalahan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem pelayanan publik, tetapi juga mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran Humas pemerintah desa menjadi sangat penting sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membangun hubungan, kepercayaan, serta partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada model komunikasi Public Relations, khususnya model Press Agency/Publicity yang ditandai dengan pola komunikasi satu arah, penggunaan media publikasi, serta keterbatasan umpan balik dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat dalam mengatasi krisis sampah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi publik di tingkat pemerintahan desa, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif dalam pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat dalam mengatasi krisis sampah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual dan holistik, khususnya terkait interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam situasi krisis pelayanan publik (Creswell, 2016). Penelitian dilaksanakan di Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut mengalami krisis pengelolaan sampah akibat terhentinya layanan pengangkutan sampah. Adapun waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dengan kegiatan mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam permasalahan komunikasi dan pengelolaan sampah di Desa Senuro Barat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Humas desa, serta empat orang masyarakat.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	A. Rasyid	Kades Senuro Barat
2.	Darmansyah	Sekdes Senuro Barat
3.	Junaidi	Ketua BPD Senuro Barat
4.	Firdaus	Humas Senuro Barat
5.	Munyati	Masyarakat Senuro Barat
6.	Nurmina	Masyarakat Senuro Barat

7.	Hendri	Masyarakat Senuro Barat
8.	Abdi Fauzan	Masyarakat Senuro Barat

Sumber: Data Penelitian (2026)

Selain itu, teknik snowball sampling digunakan secara terbatas untuk memperoleh informan tambahan apabila diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi pengelolaan sampah dan aktivitas komunikasi pemerintah desa, sementara wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait strategi komunikasi, hambatan, serta respons masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, serta dokumen kebijakan yang relevan (Sugiyono, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) selama penelitian berlangsung untuk menemukan pola komunikasi, strategi yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, serta triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member check dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan, serta peer debriefing melalui diskusi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan validitas analisis. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan meminta persetujuan informan sebelum wawancara (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas informan, serta memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara objektif tanpa manipulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat dalam mengatasi krisis sampah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi publik. Krisis sampah dapat dipahami sebagai kondisi ketika volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi meningkat secara signifikan hingga melampaui kapasitas sistem pengelolaan yang tersedia. Situasi ini tidak hanya ditandai oleh penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga oleh menurunnya efektivitas pengelolaan, sehingga sebagian besar sampah tidak tertangani secara optimal (Jovanca & Shara, 2025). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparat desa serta masyarakat. Analisis difokuskan menggunakan kerangka teori komunikasi model Press Agency/Publicity dari Grunig dan Hunt yang menekankan komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi penyampaian informasi satu arah, penggunaan media publikasi, penekanan pada kebijakan dan program, serta terbatasnya umpan balik dari masyarakat. Melalui indikator tersebut, peneliti menganalisis strategi komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat dijalankan dalam mengatasi krisis sampah serta mengidentifikasi hambatan yang muncul, sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas komunikasi yang dilakukan di tingkat desa.

A. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat

1. Strategi Komunikasi Satu Arah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas Pemerintah Desa Senuro Barat cenderung menggunakan pola komunikasi satu arah (one-way communication). sebagaimana hasil wawancara dengan informan A. Rasyid selaku kepala desa Senuro Barat yang menjelaskan

"Kami dari pemerintah desa terus menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya disampaikan saat rapat desa atau kegiatan masyarakat, supaya semua warga tahu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan."

(Wawancara A. Rasyid, 2026)

Pola komunikasi seperti ini terlihat dalam praktik yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Senuro Barat dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan sampah. Pemerintah desa berperan sebagai komunikator utama yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat berada pada posisi sebagai penerima pesan. Pola ini terlihat dari dominasi penyampaian informasi melalui forum formal seperti rapat desa serta media publikasi.



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

Gambar1. Rapat Desa Senuro Barat Rapat Desa Senuro Barat tentang Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Dalam gambar 1, terlihat bahwa proses komunikasi dalam rapat desa yang bersifat formal masih menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam penyampaian informasi, sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima, hal ini memperlihatkan bahwa fungsi humas lebih difokuskan pada aktivitas informatif, yaitu sebagai penyampai pesan kepada publik. Dalam perspektif teori komunikasi, praktik ini selaras dengan karakteristik model Press Agency/Publicity yang menitikberatkan pada penyebaran informasi secara luas tanpa menjadikan umpan balik sebagai komponen utama dalam proses komunikasi (Grunig & Hunt, 1984).

Pada aspek penyampaian informasi satu arah, komunikasi lebih bersifat informatif dan top-down. Informasi mengenai pengelolaan sampah disampaikan melalui rapat desa, sosialisasi, dan imbauan langsung. Namun, ruang dialog masih terbatas sehingga masyarakat cenderung pasif. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berkembang ke arah partisipatif, sehingga kurang efektif dalam menggali aspirasi masyarakat.

2. Peran Media Publikasi

Pemanfaatan media publikasi merupakan salah satu strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Media seperti baliho, spanduk, dan papan pengumuman termasuk dalam kategori media luar ruang yang mampu menjangkau khalayak dalam jumlah besar secara cepat dan berulang. Dalam praktiknya, Pemerintah Desa Senuro Barat memanfaatkan media publikasi sebagai salah satu sarana utama dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari penjelasan Darmansyah selaku Sekretaris Desa yang menyampaikan bahwa:

"Kami menggunakan baliho dan papan pengumuman untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait imbauan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya."
(Wawancara Darmansyah, 2026)

Dari hasil wawancara dapat dimaknai bahwa penggunaan media publikasi merupakan salah satu upaya untuk menjangkau masyarakat secara luas tanpa bergantung pada komunikasi langsung. Informasi dapat langsung diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat lebih mudah mengenali, memahami, dan mengingat isi pesan yang disampaikan.



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

Gambar2. Pengumuman Baliho di Larang Membuang Sampah

Menurut (Kurniawan, 2024) pemanfaatan baliho, spanduk, dan papan pengumuman sebagai sarana utama komunikasi merupakan langkah efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas dan berulang, tetapi

bersifat satu arah sehingga tidak menyediakan ruang interaksi. Hal ini memperkuat karakteristik model Press Agency/Publicity yang menitikberatkan pada penyebaran informasi tanpa umpan balik.

3. Strategi Penekanan Kebijakan dan Program

Penekanan pada kebijakan dan program merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi yang berorientasi pada penyampaian informasi mengenai aturan, keputusan, serta program kerja kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Humas Desa menyampaikan bahwa:

"Kami lebih menekankan pada penyampaian program desa, seperti jadwal gotong royong dan aturan pembuangan sampah, supaya masyarakat bisa mengikuti dan menjalankannya."

(Wawancara Firdaus, 2026)

Hasil cuplikan wawancara menunjukkan bahwa komunikasi lebih diarahkan pada penyampaian informasi mengenai program dan aturan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam peran tersebut, humas desa berfungsi sebagai penyampai informasi yang memastikan masyarakat memahami kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Namun penekanan yang terlalu besar pada penyampaian kebijakan dan program tanpa diimbangi dengan ruang partisipasi berpotensi membatasi keterlibatan masyarakat. Dalam penekanan pada kebijakan dan program, komunikasi lebih difokuskan pada penyampaian aturan dan kegiatan seperti gotong royong serta larangan membuang sampah sembarangan. Masyarakat menerima informasi dalam bentuk instruksi yang harus dijalankan, sehingga komunikasi cenderung bersifat normatif. Dampaknya, masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan maupun evaluasi program.

4. Keterbatasan Respons

Keterbatasan umpan balik (feedback) dalam komunikasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi antara komunikator dan komunikan, di mana arus informasi lebih dominan bergerak dari satu pihak tanpa diikuti respons yang memadai dari pihak penerima. Dalam perspektif komunikasi, umpan balik merupakan elemen esensial yang menentukan keberhasilan proses komunikasi, karena menjadi indikator pemahaman sekaligus sarana evaluasi bagi komunikator. Ketidakhadiran umpan balik menyebabkan komunikasi bersifat linear dan berpotensi menghambat terbentuknya komunikasi yang dialogis serta partisipatif (Aulia et al., 2025). Terbatasnya ruang untuk memberikan respons pada sebagian masyarakat dimaknai sebagai bentuk penerimaan. Dimana sebagian masyarakat memandang bahwa kejelasan pesan menjadi aspek utama yang dipandang penting oleh masyarakat. Informan Nurmin mengungkapkan bahwa:

"Menurut saya, apa yang disampaikan dari desa sudah cukup jelas, jadi kami tinggal mengikuti saja apa yang sudah diarahkan."

(Wawancara Nurmina, 2026)

Hal ini menandakan komunikasi yang berfokus pada penyampaian informasi dianggap telah memenuhi kebutuhan, sehingga keterlibatan dalam bentuk dialog belum menjadi prioritas. Namun sebagian masyarakat menilai bahwa ruang interaksi dalam kegiatan komunikasi masih belum berkembang secara optimal. Munyati mengungkapkan bahwa:

"Kalau ada sosialisasi, kami hanya mengikuti saja. Tidak terlalu banyak diskusi atau tanya jawab."

(Wawancara Munyati, 2026)

Ungkapan ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi belum sepenuhnya memberikan ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Proses komunikasi masih didominasi oleh penyampaian informasi, sehingga peluang untuk bertukar gagasan menjadi terbatas. Pada aspek keterbatasan umpan balik, penelitian menemukan bahwa masyarakat memiliki ruang yang terbatas untuk memberikan tanggapan. Sebagian masyarakat merasa informasi sudah cukup jelas, namun sebagian lainnya menilai kurangnya ruang dialog menghambat partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum mampu membangun interaksi dua arah yang seimbang.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang diterapkan efektif dalam menyampaikan informasi dan menjalankan program, tetapi belum optimal dalam membangun keterlibatan aktif masyarakat. Dalam

perspektif teori, praktik ini sesuai dengan model Press Agency/Publicity dan belum berkembang ke arah Two-Way Symmetrical Communication yang menekankan dialog dan partisipasi publik.

B. Hambatan Komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat

Selain strategi komunikasi, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas komunikasi publik dalam pengelolaan sampah.

1. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat berkaitan dengan rendahnya tingkat partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Berbagai upaya sosialisasi dan penyampaian informasi telah dilakukan, namun respons masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan perubahan perilaku yang diharapkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Firdaus selaku Humas Desa Senuro Barat yang menyatakan bahwa:

"Masih ada masyarakat yang kurang peduli, walaupun sudah sering diimbau. Kadang mereka tetap membuang sampah sembarangan dan tidak ikut kegiatan gotong royong."

(Wawancara Firdaus, 2026)

Pendapat serupa disampaikan oleh A. Rasyid selaku Kepala Desa, yang menyatakan:

"Kami sudah berulang kali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, tetapi masih ada yang belum terbiasa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari."

(Wawancara A. Rasyid, 2026)

Pandangan ini menunjukkan bahwa tantangan komunikasi tidak hanya terletak pada penyampaian pesan, tetapi juga pada proses internalisasi nilai yang mendorong terbentuknya kebiasaan kolektif dalam menjaga lingkungan. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, sebagian masyarakat masih menunjukkan perilaku membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, karena perubahan perilaku memerlukan proses internalisasi nilai yang berkelanjutan.

2. Keterbatasan dalam Membangun Komunikasi Yang Interaktif

Keterbatasan penggunaan media komunikasi yang mendukung interaksi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas komunikasi publik di Desa Senuro Barat, dimana penggunaan media lebih banyak bersifat satu arah dan kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan respon atau umpan balik. Hal ini tampak dari pernyataan Darmansyah selaku Sekretaris Desa Senuro Barat yang menyampaikan bahwa:

"Kami memang lebih banyak menggunakan spanduk dan papan pengumuman, jadi penyampaiannya hanya berupa informasi saja."

(Wawancara Darmansyah, 2026)

Selain itu, dari perspektif warga, Munyati mengungkapkan bahwa:

"Kalau hanya melihat spanduk atau pengumuman, kami tahu pesannya, tapi tidak ada tempat untuk bertanya atau memberi masukan."

(Wawancara Munyati, 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi, klarifikasi, maupun tanggapan terhadap pesan yang diterima. Hal tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung masih bersifat top-down dan minim interaksi dan kurang partisipatif.

3. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Faktor kebiasaan masyarakat menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penanganan krisis sampah di Desa Senuro Barat seperti perilaku membuang sampah sembarangan yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan tantangan tersendiri, karena perubahan perilaku tidak bisa terjadi secara instan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya komunikasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menggunakan strategi yang efektif untuk mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus

memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk pendidikan lingkungan, sosialisasi berulang, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan nyata yang mendukung pembentukan kebiasaan baru. Hendri, salah seorang warga Desa Senuro Barat, menyampaikan:

"Kebiasaan buang sampah sembarangan itu sudah lama, jadi walaupun sudah diingatkan, masih ada yang melakukannya."

(Wawancara Hendri, 2026)

Dari sisi pemerintah desa, Firdaus selaku Humas menegaskan:

"Kami terus mengingatkan dan memberikan contoh langsung dalam menjaga lingkungan, tapi memang dibutuhkan waktu agar warga terbiasa ikut program dan disiplin."

(Wawancara Firdaus, 2026)

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi humas pemerintah desa Senuro Barat masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan media interaktif, minimnya ruang dialog, dan kebiasaan lama yang sulit diubah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan strategi komunikasi yang lebih partisipatif, interaktif, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam program pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif komunikasi, efektivitas tidak hanya diukur dari tersampainya pesan, tetapi juga dari sejauh mana pesan tersebut mampu dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat masih didominasi oleh pendekatan informatif satu arah yang berorientasi pada penyampaian kebijakan. Meskipun strategi ini efektif dalam penyebaran informasi, namun belum mampu membangun komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, diperlukan pengembangan strategi yang lebih interaktif melalui penyediaan ruang dialog, penggunaan media komunikasi dua arah, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses kolaboratif yang mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Humas Pemerintah Desa Senuro Barat dalam mengatasi krisis sampah masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah yang berorientasi pada penyampaian informasi. Pola ini mencerminkan karakteristik model Press Agency/Publicity, di mana komunikasi difokuskan pada penyebaran pesan kepada masyarakat tanpa optimalisasi umpan balik dan dialog. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi model komunikasi Public Relations dari Grunig dan Hunt dalam konteks pemerintahan desa, khususnya dalam situasi krisis lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi model komunikasi satu arah menjadi salah satu faktor yang membatasi terciptanya komunikasi partisipatif, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi publik pada level pemerintahan lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan strategi komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif, melalui pemanfaatan media interaktif serta penyediaan ruang komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengembangan strategi komunikasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan interaktif. Pemerintah desa perlu menyediakan ruang komunikasi dua arah, memanfaatkan media yang memungkinkan interaksi, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, serta keberhasilan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan di tingkat desa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup studi kasus yang hanya dilakukan pada satu desa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi komunikasi pemerintah desa pada berbagai wilayah dengan karakteristik yang

berbeda, serta mengintegrasikan pendekatan komunikasi digital atau partisipatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas komunikasi dalam pengelolaan lingkungan.

REFERENSI

- Aulia, E. S., Putri, N. A., Lumintang, A. T., Nabiilah, N., Inessafitri, B. S., & Rahmawati, D. E. (2024). Sentiment analysis: Proses komunikasi pemerintahan pada gerakan zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta menuju kota berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 169–180. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.24032>
- Cerya, E., & Evanita, S. (2021). Strategi komunikasi lingkungan dalam membangun kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(2), 136–145. <https://doi.org/10.29210/3003977000>
- Grunig, J. E. (2018). *Strategic management of public relations: Theory and practice*. Routledge.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Jovanca, A. W. A., & Shara, A. R. I. D. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Urbanisasi terhadap Krisis Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Media Komunikasi Geografi* (Vol. 26, Number 1). Universitas Pendidikan Ganesha. <https://doi.org/10.23887/mkg.v26i1.96363>
- Khasanah, S. A., & Wijayanti, Y. T. (2025). Model strategi komunikasi lingkungan dalam mengatasi permasalahan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JCommsci: Journal of Media and Communication Science*, 8(2), 123–139. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v8i2.562>
- Kosasi, M. D., Riyantini, R., & Damayanti, D. (2025). Komunikasi partisipatif masyarakat Kota Depok dalam penyebaran informasi program bank minyak jelantah. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 8(2), 382–393. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v8i2.5210>
- Kurniawan, I. (2024). Aktivitas komunikasi dalam mensosialisasikan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah. *Journal of Communication Management and Organization*, 3(2).
- Mustikawati, H. A., Ardianti, D., & Hermawan, V. (2023). Strategi komunikasi lingkungan dalam penanganan sampah di Kampung Cibunut Berwarna Kota Bandung. *Jurnal Judika*, 1(1).
- Muttahhara, I., & Haq, N. (2023). Evaluasi program pengadaan truk sampah di Desa Pakatto Bontomarannu Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, 4(2).
- Shahreza, M., Sarwoprasodjo, S., Arifin, H. S., & Hapsari, D. R. (2020). Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(2). <https://doi.org/10.20422/jpk.v2i23.721>
- Silaban, D. I., & Viser, Y. (2023). Strategi komunikasi pemerintah dalam upaya penanganan sampah di kawasan Penfui Timur Kupang. *Jurnal ARTCOM*, 3(2).
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yunandar, F., Aji, J. F., Wibisono, W., & Purwanto, E. (2024). Strategi komunikasi publik dalam kampanye pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *INTERACTION: Communication Studies Journal*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/interaction.v1i4>
- Zaini, M. L., & Muksin, N. N. (2024). Fungsi humas pemerintah daerah Kota Serang dalam memperkuat komunikasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Cilowong. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1324>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.